PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

CIKGU MENGAPAS RUMIK (CARA UNIK GUNA MENINGKATKAN KAPASITAS GURU MIMIKA)

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Pendidikan

1.8 Waktu Uji Coba

2022-10-05

1.9 Waktu Penerapan

2023-01-10

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta;

B. PERMASALAHAN

Makro

1. Salah satu tantangan utama adalah memastikan koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan dan universitas adalah terkadang, ada kesenjangan dalam visi, tujuan, atau prioritas antara kedua institusi ini, yang dapat menghambat keselarasan dalam implementasi program-program kerja sama. Perbedaan dalam kebijakan dan regulasi antara Dinas Pendidikan (di tingkat pemerintah daerah atau nasional) dan universitas dapat menyulitkan pelaksanaan kerja sama. Hal ini bisa meliputi masalah administratif, hukum, atau birokrasi yang memperlambat proses kerja sama atau mempersulit implementasi inisiatif bersama.
2. Keterbatasan anggaran, tenaga pengajar, fasilitas, dan infrastruktur juga dapat menjadi hambatan signifikan dalam mengimplementasikan program kerja sama yang ambisius atau luas. Universitas mungkin memiliki keterbatasan dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, terutama di daerah yang kurang berkembang. Universitas perlu memastikan bahwa kurikulum dan pendekatan pengajaran mereka relevan dan dapat diadopsi dengan baik oleh siswa dan guru di lapangan. Penting untuk memiliki mekanisme evaluasi dan monitoring yang efektif untuk mengukur dampak dari kerja sama antara Dinas Pendidikan dan universitas. Hal ini membutuhkan komitmen untuk melacak pencapaian, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, dan melakukan perbaikan dalam proses kerja sama.
3. Kerja sama harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan inklusi, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal dan kelompok minoritas, dapat mengakses manfaat dari program kerja sama ini dengan adil dan merata. Dinamika dalam lingkungan pendidikan, termasuk perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan tuntutan baru dalam pendidikan global, juga dapat mempengaruhi cara kerja sama antara Dinas Pendidikan dan universitas dilakukan dan diimplementasikan.

Mikro

1. Guru memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber pendidikan lain dianggap kurang berarti tanpa keberadaan guru yang berkualitas. Kinerja dan kompetensi guru turut menyumbang transformasi perubahan peserta didik, dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak mandiri menjadi mandiri, dari akhlak buruk menjadi baik. Dapat dikatakan guru merupakan ujung tombak dan kunci utama dalam meningkatkan kualitas atas hasil pendidikan.
2. Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, guru harus meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan. Rumusan regulatif menjadi guru profesional adalah kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi guru harus dilaksanakan secara profesional, terarah, terstandar, mudah diakses, dan berkelanjutan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika saat ini sedang membenahi mutu Tenaga pendidik, Infrastruktur dan fasilitas pendidikan, guna menciptakan pendidikan mimika yang unggul. Tenaga Pendidik tingkat SMP dan SMA mengikuti pelatihan kompetensi dari Universitas Negeri Makassar dan untuk Tenaga Pendidik tingkat SD megikuti pelatihan kompetensi di Universitas Negeri Jakarta.

C. ISU STRATEGIS

1. **Isu Global**

   Isu Global Isu global dalam kompetensi guru meliputi berbagai tantangan dan persyaratan yang dihadapi oleh pendidik di era globalisasi saat ini. Beberapa isu kunci yang muncul termasuk:

   Pendidikan Multikultural: Guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberagaman budaya, bahasa, dan nilai-nilai di kelas mereka. Mereka harus mampu mengelola kelas dengan siswa dari latar belakang yang berbeda secara efektif, mempromosikan inklusi, dan menghormati identitas budaya masing-masing siswa. **Kemampuan Beradaptasi dengan**

Perubahan Teknologi: Teknologi terus berkembang dengan cepat, dan guru perlu memiliki keterampilan digital yang kuat. Mereka harus dapat mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mempersiapkan mereka untuk dunia yang semakin terhubung secara digital.

Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif: Guru harus mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, karena keterampilan ini sangat dibutuhkan di era informasi dan pengetahuan saat ini

2. **Isu Nasional**

Di Indonesia, kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan universitas juga menghadapi beberapa isu yang perlu diperhatikan dan diatasi untuk mencapai tujuan-tujuan kerja sama yang optimal. Berikut adalah beberapa isu utama yang sering muncul:

Keterbatasan Akses dan Kualitas Pendidikan: Salah satu isu utama adalah keterbatasan akses dan kualitas pendidikan di beberapa daerah, terutama daerah terpencil dan pedalaman. Kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan universitas perlu memperhatikan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang merata dan kualitas pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia.

Kesenjangan Riset dan Inovasi: Meskipun beberapa universitas di Indonesia memiliki kemampuan riset yang baik, masih ada kesenjangan dalam pengaplikasian penelitian dan inovasi dalam pendidikan di tingkat daerah. Kerja sama perlu memperkuat transfer pengetahuan dari universitas ke praktisi pendidikan di lapangan, serta mendorong inovasi pendidikan yang relevan dan dapat diadopsi secara luas.

Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur: Banyak daerah di Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Kerja sama dengan universitas dapat membantu dalam pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendidikan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik: Masih ada tantangan dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia. Universitas dapat berperan penting dalam melatih guru-guru baru, serta menyediakan pelatihan lanjutan dan pengembangan profesional kepada guru-guru yang sudah bekerja. Kerja sama ini perlu diarahkan untuk meningkatkan standar pendidikan dan keterampilan pengajaran di semua tingkatan.

Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan: Terkadang, koordinasi antara Dinas Pendidikan dan universitas dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa program-program pendidikan yang ditawarkan oleh universitas mendukung kebijakan pendidikan nasional dan daerah dengan efektif.

3. **Isu Lokal**

Isu lokal mengenai kerja sama antara Dinas Pendidikan dan universitas di Kabupaten Mimika bisa meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut. Beberapa isu yang mungkin muncul adalah sebagai berikut

Akses dan Ketersediaan Pendidikan Tinggi: Kabupaten Mimika mungkin memiliki keterbatasan dalam akses terhadap perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa dan masyarakat setempat untuk mengakses pendidikan tinggi dan kualifikasi yang lebih tinggi. ü Kurikulum dan Relevansi Program: Kesesuaian kurikulum universitas dengan kebutuhan lokal dan pasar kerja setempat dapat menjadi permasalahan. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa program program yang mereka tawarkan relevan dengan kebutuhan industri dan pengembangan ekonomi di Kabupaten Mimika.

Keterlibatan dalam Pengembangan Kurikulum Sekolah: Kerja sama yang kuat antara Dinas Pendidikan dengan universitas dapat membantu dalam pengembangan kurikulum sekolah yang lebih baik. Ini termasuk mengintegrasikan teknologi baru, memperkenalkan metode pembelajaran inovatif, dan memastikan bahwa siswa dilengkapi dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan mereka. ü Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pendidik: Universitas dapat berperan penting dalam melatih dan mengembangkan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Mimika. Kerja sama dalam hal ini dapat meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar secara efektif, menggunakan teknologi dalam pendidikan, dan memperbaiki praktik pembelajaran.

Penelitian dan Pengembangan Lokal: Universitas juga dapat berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan lokal yang bermanfaat bagi Kabupaten Mimika. Ini termasuk penelitian terapan untuk meningkatkan sektor pertanian, perlindungan lingkungan, atau pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif. ü Akses terhadap Sumber Daya dan Fasilitas: Kerja sama antara Dinas Pendidikan dan universitas dapat membantu dalam membagi sumber daya dan fasilitas, seperti laboratorium, perpustakaan, atau akses ke jaringan riset, yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan SDM: Universitas juga dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui program-program pendidikan non-formal, pelatihan keterampilan, atau pemberian akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok-kelompok marginal.

D. METODE PEMBAHARUAN

Sebelum adanya Inovasi :

Guru meningkatkan kapasitasnya masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri sehingga hasilnya tidak sama merata antar guru. Guru-guru tidak mengikuti pelatihan.

Setelah adanya Inovasi :

Kompetensi/kapasitas guru-guru meningkat yang sebelumnya cara mengajar itu-itu saja sekarang menjadi lebih kreatif dalam mengajar di kelas sehingga para siswa tidak bosan dalam belajar dan mudah menangkap mata pelajaran.

E. KEUNGGULAN INOVASI

1. Semua guru mendapat kesempatan yang sama untuk ikut pelatihan
2. Semua guru mendapat pelatihan yang sama sesuai dengan bidangnya
3. Kurikulum pelatihan yang bagus, terakreditasi dan up-to-date
4. Guru tidak perlu keluar biaya dan waktu utk mengikuti pelatihan guru ke luar daerah

F. CARA KERJA INOVASI

1. Seluruh Sekolah mendata jumlah Guru pengajar yang ada sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
2. Pihak UNJ (Universitas Negeri Jakarta) dan UNM (Universitas Negeri Makassar) datang ke Kabupaten Mimika untuk melakukan pelatihan peningkatan kompetensi guru sesuai dengan mata pelajaran. Dosen UNJ (Universitas Negeri Jakarta) melakukan pelatihan guru-guru di SMP dan Dosen UNM (Universitas Negeri Makassar) melakukan pelatihan guru-guru di SD.
3. Tahap Evaluasi/ Review pada Guru-Guru
4. Guru menerapkan hasil pelatihan kompetensi

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

1. Tercapainya guru yang mandiri;
2. Guru menjadi terampil dalam mengajar;
3. Guru memiliki cara unik dalam mengajar.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

1. Meningkatnya kemampuan guru dalam mengajar para peserta didik dengan metode yang mudah dipahami dan dapat ditangkap peserta didik.
2. Meningkatnya pemahaman guru tentang gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik
3. Mengevaluasi kinerja guru dan dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan.

1.13 Hasil Inovasi

1. Guru menjadi agen perubahan yang pola mengajar ke peserta didik bersifat kreatif dan inovatif
2. Guru menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik
3. Guru dapat mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• **Tentang** Penetapan Inovasi Daerah
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	Lebih dari 30	• **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024
3	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	• **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2023 • **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2024 (Sekolah Dasar) • **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2024 (Sekolah Menegah Pertama) • **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2024 (Pendidikan Anak Usia Dini) • **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2024 (Sekolah Menegah Atas) • **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2024 (Sekolah Menegah Kejuruan) • **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2025 (Sekolah Dasar) • **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2025 (Sekolah Menengah Pertama) • **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2025 (Pendidikan Anak Usia Dini) • **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2023 (Sekolah Menegah Atas) • **Tentang** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Cikgu Mengapas Rumik Tahun 2025 (Sekolah Menengah Kejuruan)

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
4	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• **Tentang** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2023 • **Tentang** Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 • **Tentang** Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025
5	Pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	• **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024
6	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	
7	Kemudahan informasi layanan	Layanan melalui 2 dari 4 media	• **Tentang** Kantor Dinas Pendidikan • **Tentang** https://www.pendidikanmimika.org/
8	Kecepatan penciptaan inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• **Tentang** PROPOSAL Inovasi Cikgu Mengapas Rumik
9	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja didukung dengan perangkat elektronik Contoh : mesin edc, telp.	• **Tentang** Sekolah • **Tentang** Presentasi/PPT dari Pemateri
10	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih	• **Tentang** Penerima Manfaat Cikgu Mengapas Rumik • **Tentang** Daftar Penerima Manfaat Cikgu Mengapas Rumik PAUD 2024 • **Tentang** Daftar Penerima Manfaat Cikgu Mengapas Rumik SD 2024 • **Tentang** Daftar Penerima Manfaat Cikgu Mengapas Rumik SMP 2024
11	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	• **Tentang** Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024
12	Pedoman teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	• **Tentang** Pedoman Teknis Cikgu Mengapas Rumik
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	• **Tentang** Jadwal Pendampingan UNM
14	Kualitas inovasi daerah*	Memenuhi 5 unsur substansi	